

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Fokus penelitian ini adalah hubungan sosial antara Bunda Mayora dan masyarakat Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hubungan tersebut memperlihatkan dinamika sosial yang unik karena mempertemukan dua hal yang tampak bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan keberadaan seorang pemimpin transpuan yang membawa identitas gender di luar norma umum. Keberadaan Bunda Mayora sebagai transpuan pertama yang menjadi pejabat publik di Indonesia menimbulkan berbagai bentuk respon sosial, mulai dari penerimaan, penolakan, hingga negosiasi yang terus berlangsung. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan tentang keberagaman gender, tetapi juga tentang bagaimana relasi sosial terbentuk, dipertahankan, dan dinegosiasikan di tengah pertarungan makna dan berbagai wacana sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menelaah dinamika itu, penelitian ini menerapkan *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0) yang dikembangkan oleh Leslie A. Baxter dan Barbara Montgomery.

Untuk memahami dinamika hubungan tersebut, penting melihatnya dalam konteks kehidupan sosial Indonesia yang kaya akan keberagaman namun sarat dengan ketegangan antara nilai tradisional dan prinsip kesetaraan. Dalam realitas

sosial masyarakat Indonesia yang beragam, kesetaraan dan inklusi kerap dipandang sebagai nilai yang diharapkan, namun praktiknya masih terlihat adanya ketidakadilan dan stigma terhadap kelompok minoritas gender. Diskriminasi dan penolakan sosial terhadap transpuan masih menjadi hambatan besar dalam kehidupan sosial (Tri et al., 2021, p. 160). Dalam kerangka RDT 2.0, kondisi ini menggambarkan adanya pertarungan antara wacana dominan mengenai norma sosial dan wacana alternatif mengenai penerimaan identitas diri.

Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma heteronormatif menjadikan komunitas transpuan dan LGBTQ+ menghadapi banyak kesulitan (Febriani & Irwanto, 2021, p. 6). Dalam konteks ini, kemunculan Bunda Mayora sebagai pejabat publik transpuan pertama di Indonesia menjadi fenomena menarik, sebab kehadirannya menantang kontradiksi sosial yang selama ini diabaikan. Ketidaksetaraan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini membuat berbagai bentuk ketimpangan dan diskriminasi kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena sistem patriarki telah menjadi bagian dari norma sosial, budaya, bahkan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan (Prakasya et al., 2019, p. 3951). Oleh karena itu, diperlukan ruang-ruang dialog yang mampu membuka cara pandang masyarakat bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan pilihan hidupnya (Nama Penulis, Tahun). RDT 2.0 menjelaskan bahwa hubungan antarindividu tidak hanya berisi tegangan dinamis, tetapi juga menjadi ruang dialogis tempat berbagai wacana saling berinteraksi dan membentuk makna. Dalam hal ini, hubungan antara Bunda Mayora dan masyarakat menunjukkan upaya

negosiasi antara nilai konservatif masyarakat dan penerimaan terhadap keberagaman gender.

Penerimaan masyarakat terhadap transgender bervariasi, tergantung pada pemahaman dan tingkat pengetahuan individu (Chendra & Ayu Candraingrum, 2021, p. 418). Dalam kerangka RDT 2.0, variasi penerimaan ini menunjukkan adanya keberagaman suara atau wacana dalam masyarakat yang terus dinegosiasikan. Bunda Mayora, melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, advokasi kemanusiaan, dan kegiatan desa, berhasil membangun jembatan komunikasi yang memperkuat relasi sosial. Proses keterlibatan tersebut mencerminkan negosiasi makna, di mana masyarakat yang semula intoleran mulai membuka ruang penerimaan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kusumo Aji, 2023, p. 3), komunikasi yang efektif berperan penting dalam membantu individu beradaptasi, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan positif yang sejalan dengan prinsip dinamika kontradiksi dalam teori RDT.

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober 2024, Bunda Mayora menjelaskan secara langsung bahwa dirinya kerap menghadapi kontradiksi sosial dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil ketua BPD Kabupaten Sikka. Ia menuturkan bahwa di satu sisi sebagian masyarakat menerima keberadaannya karena kinerjanya dinilai baik dan dekat dengan warga, namun di sisi lain masih ada kelompok yang menolak karena identitas gendernya dianggap bertentangan dengan norma agama dan adat setempat. Menurut pengakuannya,

“Masyarakat di sini sebenarnya baik, tapi masih ada yang belum bisa menerima saya sepenuhnya sebagai pemimpin perempuan transpuan.” (Bunda Mayora, wawancara 17 Maret 2026).

Pernyataan ini memperkuat indikasi adanya pertarungan wacana (*discursive struggle*) sebagaimana digambarkan dalam teori RDT 2.0, di mana dua pandangan yang saling bertentangan, yakni penerimaan dan penolakan, berjalan berdampingan dalam hubungan sosial yang sama.

Hasil pra-observasi juga menunjukkan bahwa Bunda Mayora berusaha menjaga relasi dengan semua pihak melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan publik, dan acara keagamaan lokal. Ia memilih menghadapi ketegangan dengan pendekatan terbuka dan empatik, bukan konfrontatif. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana kontradiksi dalam hubungan sosial tidak harus dihapuskan, melainkan dapat dinegosiasikan untuk membangun pemahaman bersama. Hal ini selaras dengan prinsip RDT 2.0 yang menegaskan pentingnya dialog dan negosiasi makna dalam mempertahankan hubungan sosial di tengah perbedaan.

Di tingkat global, keterlibatan LGBT dalam dunia publik mengalami perkembangan (Hanum et al., 2022, p. 172). Sebagai contoh, dilansir dari (LGBTQ+ Victory Institute) selama pemerintahan Barack Obama, lebih dari 250 profesional LGBTQ diangkat ke posisi penting, termasuk Raffi Freedman-Gurspan, seorang transpuan yang menjadi direktur rekrutmen dan penasihat untuk isu-isu LGBTQ. Presiden Obama telah membuat langkah bersejarah untuk memperluas peluang dan memajukan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang Amerika

termasuk LGBT. Langkah ini tidak hanya memberikan representasi bagi komunitas LGBTQ tetapi juga mencerminkan perubahan positif dalam penerimaan sosial di negara-negara yang lebih inklusif.

Namun, di Indonesia posisi komunitas LGBT masih terpinggirkan dan sering menghadapi diskriminasi sistematis. Kelompok ini kerap dianggap melanggar moral dan nilai agama (Ismail, 2022, p. 109). Transpuan menghadapi marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan: pekerjaan, pendidikan, hingga partisipasi politik. Data Konde.co (Fithria, 2025) menunjukkan bahwa 293 atau 64,2 % korban kekerasan berbasis gender adalah transpuan.

Laporan Arus Pelangi (2019) juga menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap komunitas transpuan meningkat setiap tahun. Tahun 2017 tercatat 973 kasus kekerasan terhadap LGBTQ+, dengan 73% korbannya transpuan. Tahun 2018-2019 terjadi 11 kasus pembunuhan transpuan, dan pada 2020 terdapat 45 peraturan daerah yang mengandung unsur diskriminatif (Thahara & Hadiwono, 2022, p. 392). Kondisi ini mempertegas ketegangan antara struktur sosial dan kebutuhan individu akan pengakuan diri yang dalam perspektif RDT 2.0 dipahami sebagai pertarungan antara wacana dominan dan wacana alternatif dalam masyarakat.

Selain faktor sosial, media massa berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap komunitas LGBT. Media seperti *Republika.co.id* sering menggambarkan mereka secara negatif (Afniar, 2019, p. 43). Penelitian LBHM (2018) terhadap pemberitaan media daring sepanjang 2017 menunjukkan bahwa

dari 973 korban, sebanyak 715 orang atau 73,86% merupakan kelompok transgender. (Debineva & Pelupessy, 2019, p. 22). Akibatnya, masyarakat membangun pandangan kontradiktif: di satu sisi mendukung prinsip kesetaraan, di sisi lain tetap menolak keberadaan transpuan (Sa'idah et al., 2022, p. 13).

Hasil penelusuran peneliti juga menunjukkan bahwa data mengenai jumlah transpuan yang berdaya di Indonesia hingga kini belum tersedia. Namun demikian, beberapa figur publik dapat menjadi indikator potensi pemberdayaan kelompok ini. Jessica Aurelia, misalnya, adalah seorang guru transpuan yang kiprahnya dalam dunia pendidikan diberitakan oleh *women.okezone* (Sukardi, 2025). Selain itu, Alegra Wolter, yang dikenal sebagai dokter transpuan pertama di Indonesia, merupakan aktivis kesehatan gender yang pernah diulas oleh BBC Indonesia (Widadio, 2025). Sementara itu, Bunda Mayora, yang dikenal sebagai transpuan pertama yang menduduki posisi pejabat publik di Indonesia, banyak disorot oleh BBC Indonesia melalui pemberitaan mengenai perannya dalam memperjuangkan hak-hak kelompok marginal (Irham & Marta, 2025).

Minimnya data tersebut justru menegaskan adanya kontradiksi sosial: semakin banyak transpuan yang aktif dan tampil dalam ruang publik, semakin kuat pula resistensi serta tantangan struktural yang mereka hadapi di masyarakat. Minimnya data tersebut justru menegaskan kontradiksi sosial yang terjadi, semakin banyak transpuan yang aktif secara sosial, semakin kuat pula resistensi dan tantangan yang mereka hadapi dari masyarakat, mencerminkan pertarungan berbagai wacana sosial dalam interaksi masyarakat.

Kehadiran Bunda Mayora di masyarakat Desa Habi menghadirkan kontradiksi relasional yang khas. Sebagian masyarakat menilai kinerjanya positif dan pantas dihargai, sementara sebagian lain menolak karena identitas gendernya dianggap bertentangan dengan nilai lokal. RDT 2.0 melihat situasi ini bukan sebagai konflik yang harus dihapuskan, melainkan sebagai proses dialogis yang terus bergerak melalui negosiasi berbagai wacana antara penerimaan dan penolakan, keterbukaan dan ketertutupan, serta stabilitas dan perubahan.

Teori *Relational Dialectics 2.0* membantu menjelaskan bahwa setiap hubungan interpersonal dibentuk melalui pertarungan dan negosiasi berbagai wacana sosial. Dalam kasus Bunda Mayora, kontradiksi muncul antara kebutuhan penerimaan sosial untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tradisional dan kebutuhan otentisitas identitas, yakni mempertahankan jati dirinya sebagai transpuan. Hubungan antara Bunda Mayora dan masyarakat menjadi ruang negosiasi yang hidup, di mana makna tentang kepemimpinan, moralitas, dan gender terus dinegosiasikan dan diinterpretasikan ulang (Putri & Boer, 2019, p. 72).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana dinamika relasi antara Bunda Mayora dan masyarakat Desa Habi dipahami melalui teori *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0). Pertanyaan ini penting karena kontradiksi yang terjadi tidak hanya memengaruhi efektivitas kepemimpinannya, tetapi juga mencerminkan proses sosial yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia menegosiasikan makna keberagaman dan inklusivitas melalui berbagai wacana sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan menelaah dinamika ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang bentuk-

bentuk negosiasi sosial dan pertarungan wacana yang muncul dalam konteks hubungan antaridentitas yang berbeda.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna menggali secara mendalam dinamika hubungan sosial antara Bunda Mayora dan masyarakat di Desa Habi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap pengalaman sosial serta bentuk-bentuk negosiasi makna yang terjadi di lapangan. Menurut Johansson dalam (Ridlo Ubaid, 2023, p. 32), studi kasus bertujuan memahami secara mendalam kompleksitas fenomena sosial dengan menelaah berbagai aspek yang membentuknya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu transpuan, namun belum banyak yang menyoroti dinamika relasional dalam konteks publik. Sebagai contoh, penelitian (Saleh & Arif, 2018) menyoroti konservatisme agama di Indonesia yang cenderung menolak LGBT. Kemudian, (Zahra et al., 2024) menekankan pentingnya dukungan sosial bagi pekerja seks waria, tanpa mengeksplorasi strategi komunikasi. Penelitian (Chendra & Ayu Candraingrum, 2021) fokus pada stigma budaya dan agama terhadap transgender. (Afniar, 2019) mengkaji representasi mereka di media massa. Sementara itu, (Sadiyyah, 2024) membahas pengalaman komunikasi santri waria, tetapi belum menyentuh komunikasi transpuan dalam ruang publik,

Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0) dalam menganalisis relasi sosial Bunda Mayora dan masyarakat Desa Habi. Kajian ini tidak hanya menyoroti penerimaan sosial terhadap transpuan di lingkungan konservatif, tetapi juga memperlihatkan

bagaimana negosiasi makna, komunikasi interpersonal, serta interaksi berbagai wacana sosial membentuk hubungan yang saling memengaruhi. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dimensi budaya, agama, dan hukum lokal yang memengaruhi proses dialogis dalam kehidupan sosial, sehingga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana kelompok minoritas dapat membangun relasi positif di tengah kontradiksi nilai

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pejabat transpuan di Indonesia menegosiasikan berbagai kontradiksi dan wacana sosial dalam interaksinya dengan masyarakat Desa Habi melalui perspektif *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0)?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dinamika hubungan sosial antara pejabat transpuan dengan masyarakat Desa Habi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, melalui perspektif *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0), khususnya dalam memahami proses negosiasi makna dan berbagai wacana sosial yang muncul dalam interaksi masyarakat.

I.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, ruang lingkup kajian dibatasi pada praksis diskursif Bunda Mayora sebagai pejabat publik transpuan dalam mengelola pertarungan wacana sosial masyarakat di Desa Habi, Kabupaten Sikka, NTT melalui perspektif *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0). Penelitian ini

tidak berfokus pada strategi komunikasi, melainkan pada proses relasional dan pertukaran wacana yang muncul dalam interaksi sosial antara Bunda Mayora dan masyarakat.

Fokus penelitian diarahkan pada dinamika dialogis dalam hubungan sosial yang ditandai oleh pertarungan antara wacana dominan (*centripetal discourse*) dan wacana alternatif (*centrifugal discourse*) terkait identitas transpuan dan posisi Bunda Mayora sebagai pejabat publik. Penelitian ini juga melihat bagaimana utterance chain terbentuk melalui percakapan, respons sosial, dan praktik keseharian yang membangun makna relasional di tengah masyarakat Desa Habi.

Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kontradiksi sosial dan pertarungan wacana dinegosiasikan melalui praktik komunikasi sehari-hari dalam perspektif *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0). Melalui interaksi antara Bunda Mayora dengan masyarakat Desa Habi, muncul proses negosiasi makna yang memperlihatkan adanya dinamika antara penerimaan dan penolakan, dukungan dan resistensi, serta wacana dominan dan wacana alternatif yang terus membentuk relasi sosial di tengah masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Lewat penyusunan proposal ini, peneliti berharap dapat memperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat di tengah

keberagaman identitas gender, khususnya terkait keberadaan transpuan dalam ruang publik.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memahami dinamika pertarungan wacana sosial terhadap kelompok minoritas gender, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif.

1.5.2. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam penerapan *Relational Dialectics Theory 2.0* (RDT 2.0) untuk memahami dinamika hubungan sosial, pertarungan wacana, dan negosiasi makna dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai gender, relasi sosial, dan kepemimpinan publik, terutama dalam melihat bagaimana praktik komunikasi sehari-hari membentuk hubungan yang dialogis di tengah kontradiksi sosial dan budaya.